

LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Rembang

@Dinas Komunikasi dan Informatika_rembang  **Dinas Komunikasi dan Informatika@rembangkab.go.id**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2019.

LKjIP SKPD Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Rembang, Pebruari2020

A.n.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIS

Drs. ANDI DIMYANTO

Pembina Tk.I
NIP. 19621215 199003 1 012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
	B. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika	15
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	Uraian ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2019	20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	25
	1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019	26
	2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir	29
	3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	29
	4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional (jika ada)	29
	5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	29
	6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	29
	7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	29
	B. Perbandingan antara Renstra Lama dan Renstra baru	29
	C. Realisasi anggaran	29
BAB IV	PENUTUP	35
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021	18
Tabel 2	Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	18
Tabel 3	Program Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	20
Tabel 4	Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	27
Tabel 5	Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018	30
Tabel 6	Realisasi Triwulan	34
Tabel 7	Hasil Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang pada tahun 2018 2021	37

DAFTAR GAMBAR

				Hal
Gambar 1	Bagan	Susunan	OrganisasiDinas Komunikasi dan	
	Informatika	KabupatenRembang		v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas**
- 2) Sekretariat dengan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :**
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2 (Dua) Seksi, yaitu :**
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi.
 - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
- 4) Bidang Pengelolaan e- Government 2 (Dua) Seksi yaitu :**
 - a. Seksi Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Persandian
 - b. Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi dan Statistik

Terperinci tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

a. TUGAS POKOK

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. URAIAN TUGAS

- 1. Menjabarkan kebijakan strategis penierintah daerah di bidang komunikasi dan informatika guna menentukan sasaran kebijakan;
- 2. Menyusun kebijakan bidang komunikasi dan informatika sebagai bahan kebijakan atasan dan pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. Merencanakan program kerja di bidang komunikasi dan infomoatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 4. Merumuskan sasaran program kerja di komunikasi dan informatika guna menentukan prioritas program;
- 5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- 7. Menelaah, menyusun dan merumuskan peraturan dan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika;
- 8. Menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika;
- 9. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan fasilitasi bidang komunikasi dan informatika;
- 10. Menyelenggarakan administrasi bidang komunikasi dan informatika sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 11. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang komunikasi dan informatika;
- 12. Menyelenggarakan tugas bidang komunikasi dan informatika;
- 13. Menyelenggarakan kesekretariatan dinas;

14. Menyelenggarakan kegiatan teknis fungsional di bidang komunikasi dan informatika;
15. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
16. Menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
17. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
18. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berhubungan dengan bidang tugas pekerjaan.

2. SEKRETARIS

a. TUGAS POKOK :

Menyiapkan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. FUNGSI :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;

- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. URAIAN TUGAS :

- 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2. Merencanakan program kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 3. Merumuskan sasaran program kegiatan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
- 6. Menyediakan data dan informasi bidang kesekretariatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- 7. Menyelenggarakan kegiatan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 8. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- 9. Mengelola penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dinas dengan bidang terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- 10. Mengelola penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- 11. Menyediakan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), LKPJ/LPPD, pengawasan melekat, pengendalian operasional

kegiatan dan laporan rutin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

12. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
13. Mengelola administrasi kepegawaian Dinas;
14. Meneliti, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar guna tercapainya tertib administrasi;
15. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
16. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
17. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesekretariatan;
19. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
20. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan ;
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas.

3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK.

a. TUGAS POKOK

Menyiapkan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang terdiri dari Pengelolaan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik

b. FUNGSI ;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. URAIAN TUGAS :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merencanakan program kegiatan di bidang komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan sasaran program kegiatan komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
6. Menyediakan data dan informasi bidang komunikasi dan informatika sebagai bahan pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan pelayanan bidang media komunikasi dan informatika;
8. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan komunikasi dan informatika untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan;
9. Menyelenggarakan administrasi bidang komunikasi dan informatika sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
10. Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informatika;
11. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang komunikasi dan informatika;
12. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
14. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
15. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas.

4. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN e- GOVERNMENT

a. TUGAS POKOK

Menyiapkan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan *e-Government* yang terdiri dari Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Persandian serta Pengelolaan Data dan Aplikasi, dan Statistik.

b. FUNGSI ;

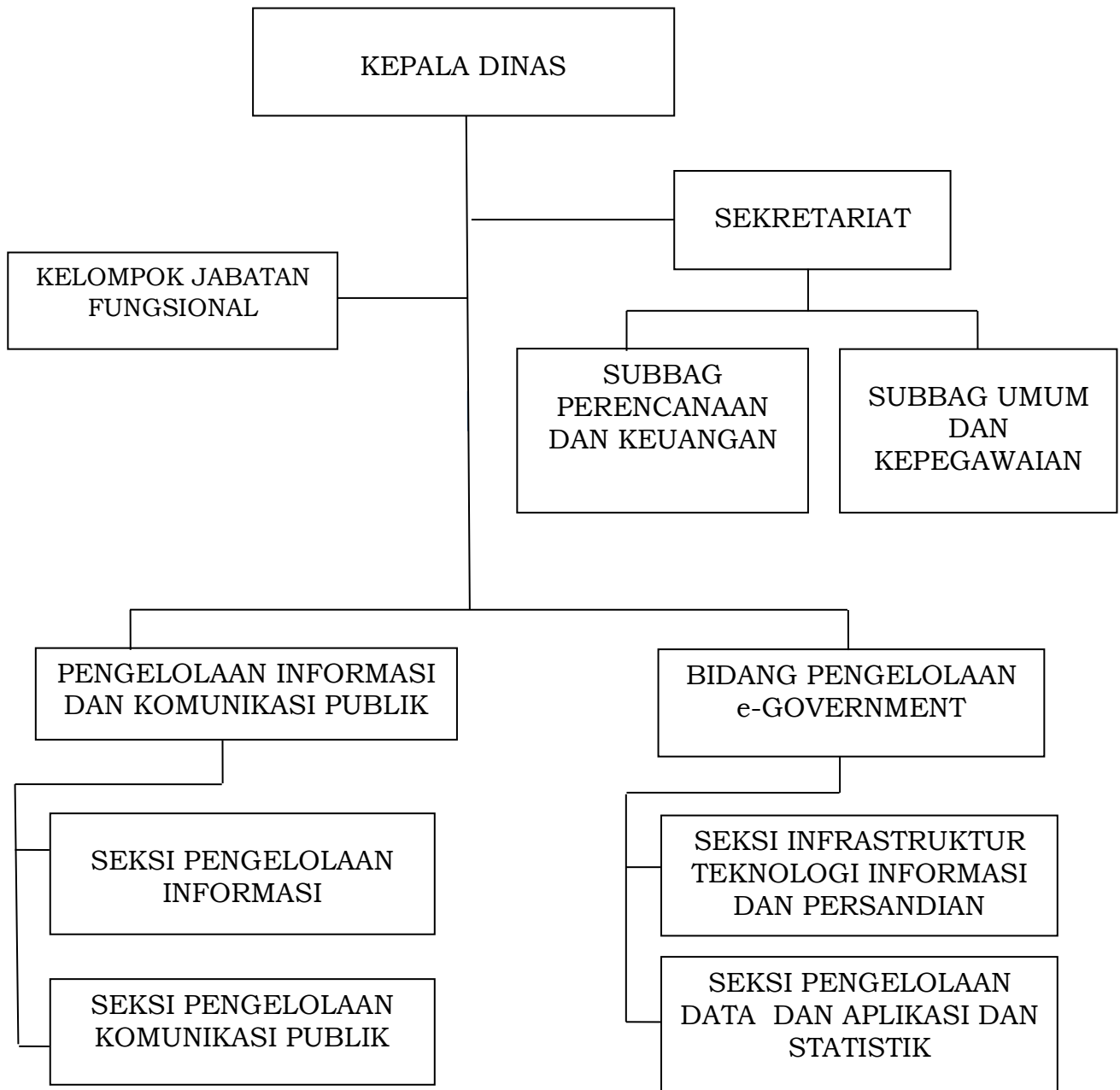
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi, dan Persandian, dan Pengelolaan Data dan Aplikasi, dan Statistik;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi, dan Persandian, dan Pengelolaan Data dan Aplikasi, dan Statistik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data dan Aplikasi, dan Statistik;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya

c. URAIAN TUGAS :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merencanakan program kegiatan di bidang komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan sasaran program kegiatan komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
6. Menyediakan data dan informasi bidang komunikasi dan informatika sebagai bahan pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan pelayanan bidang media komunikasi dan informatika.

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang



Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai amanat dari Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ditunjang oleh sumber daya manusia dengan jumlah personel untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah sebanyak 29 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan formal :

1.	Pendidikan Pasca Sarjana	3	Orang
2.	Pendidikan Sarjana	18	Orang
3.	Pendidikan D 4	0	Orang
4.	Pendidikan D 3	1	Orang
5.	Pendidikan Sekolah Menengah Umum	7	Orang
6.	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Orang
7.	Pendidikan Sekolah Dasar	1	Orang

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Jabatan :

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan Kepangkatan :

1.	Golongan IV	4	Orang
2.	Golongan III	19	Orang
3.	Golongan II	5	Orang
4.	Golongan I	1	Orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan / Eselon :

1.	Eselon II.b	1	Orang
2.	Eselon III.a	1	Orang
3.	Eselon III.b	2	Orang
4.	Eselon IV.a	6	Orang

B. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, tidaklah terlepas dari apa yang tertuang di RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 s.d 2021 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang terdapat permasalahan utama yang dirumuskan dengan isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja di dukung SDM yang tangguh.
2. Belum optimalnya pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ketertiban masyarakat.
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan komunikasi dan informasi.

Meningkatkan pelayanan informasi publik yang akurat, cepat mudah dan merata serta meningkatkan efektifitas pelayanan komunikasi dan informatika yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi/ Bupati kepada pimpinan instansi yang lebih rendah/ Kepala perangkat daerah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja dapat terwujud komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Rembang untuk mewujudkan target kinerja (Terlampir).

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang telah melaksanakan total 10 (sepuluh) program dan 48 (empat puluh delapan) kegiatan termasuk DPA Perubahan Tahun Anggaran 2019 dengan total anggaran sebesar Rp.8.042.507.728,-. Namun demikian Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2019 dengan Bupati Rembang masih berdasarkan pada DPA induk tahun anggaran 2019.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian kinerja organisasi

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, terwujudnya *Good Governance* diharapkan dapat berperan besar dalam peningkatan pengelolaan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Rembang, sehingga tercipta pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019.

No	Urusan dan program pembangunan	Indikator kinerja program (out come)	Satuan				
				2018		2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa						
		Presentase peningkatan update konten pada website www.rembangkab.go.id	%	94	100	96	100
		Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah	%	65		70	75
		Presentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan internet	%	100	100	100	100
		Presentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	%	90	100	100	100
		Presentase PD telah memiliki website (%)	%	100	100	100	100
		Cakupan pengembnagan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	30	84	35	
	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi						
		Cakupan pengawasa menara BTS	nilai	160	100	165	100
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi						
		Presentase layanan publik berbasis TIK	%	60	100	65	100
		Persentase perangkat daerah yang menerapkan e-government	%	60	100	80	100
		Persentase interkoneksi internet dan jaringan internet kabupaten, kecamatan,desa dan perangkat daerah	%	50		55	75
	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa						

		Rata-rata berita yang dipublikasikan tiap bulan	%	37	100	40	100
		Presentase expo skala nasional yang diikuti dalam satu tahun	%	100	0	100	0
	Program Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi						
		Presentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi TIK	%	40		45	45
	Urusan Statistik						
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah						
		Presentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	92	85	95	100
		Persentase publikasi dokumen Rembang dalam angka yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	100
		Persentase publikasi dokumen NTP yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	100
		Persentase publikasi dokumen PDRB sektoral tingkat kecamatan yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	100
		Persentase publikasi dokumen statistik kemiskinan,kependudukan,pendidikan,kesehatan,ketenagakerjaan dan sosial yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	100
	Urusan Persandian						
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah						
		Persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya	%	100		100	100
		Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penangan Aduan	%	70	70	70	76

2. *Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.*

KinerjaDinas Komnिकासidan Informatika Kabupaten Rembang5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2

Sasaran 1. : Terwujudnya *Good Governance*

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capai - an 2019	% Capai - an 2018	% Capai - an 2017	RPJMD	
	2019	2019				Target Akhir 2021	% Capai - an s/d 2019
1	2	3	4=3/2* 100%	5	6	7	8=3/7* 100%
SPBE (Pemeringkatan e- Government	3.20	2.87	89.68%	74.41%	79.03%	3.50	82.00
Rata-rata capaian			89.68%	74.41%	79.03%		

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran *Good Governance* dengan 4 (empat) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja 92,67% dengan predikat sangat berhasil, dengan analisa sebagai berikut:

1. SPBE

Skor SPBE (Peningkatan *e-Government*), target 3,01, realisasi 2,24, sehingga capaian kinerja 74,41%

$$\frac{\text{Skor SPBE Realisasi}}{\text{Skor SPBE Target}} \times 100 \%$$

$$\frac{2,87}{3,20} \times 100 \% = 89,68 \%$$

Apabila disandingkan dengan target pada akhir masa RPJMD yaitu sebesar 3,50%, maka capaian pada tahun 2019 adalah sebesar 82,00%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran ini ada pada Dimensi Kebijakan, kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan, sehingga dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan *e-Government* pada Pemerintah Kabupaten Rembang pada dimensi tersebut.

Besaran presentase capaian indikator pada perhitungan diatas menunjukkan bahwa capaian tersebut cenderung menurun dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terjadi sebagai akibat dari dasar penyusunan RKPD Tahun 2017 yang masih menggunakan RPJMD

Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 sebagaimana dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 tertanggal 2 Juni 2016, sedangkan untuk RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sendiri baru ditetapkan pada bulan September Tahun 2016.

Untuk meningkatkan capaian sasaran tersebut maka program pembangunan yang mendukung pelaksanaan sasaran adalah:

- 1) Program Peningkatan disiplin aparatur
- 2) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
- 3) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 4) Program kerjasama informasi dan media massa
- 5) Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
- 6) Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat
- 7) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

Sasaran 5. Terciptanya Pelayanan Publik yang Cepat Tanggap dan Prima.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terciptanya Pelayanan Publik yang Cepat, Tanggap dan Prima dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan capaian kinerja 100,33% dengan predikat sangat berhasil, dengan hasil pengukuran indikatornya seperti berikut:

Tabel III.6

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capai - an 2019	% Capai - an 2018	% Capai - an 2017	RPJMD	
	2019	2019				Target Akhir 2021	% Capai - an s/d 2019
1	2	3	4=3/2* 100%	5	6	7	8=3/7* 100%
Persentase perangkat daerah yang memiliki Website Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata capaian			100%	100%	100%	100%	100%

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki Website Aktif

Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki Website Aktif target pada tahun 2019 adalah 100%, dan realisasinya sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%, penunjang atas keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah pro-aktifnya admin subdomain web, dalam mengisi konten yang berupa data ataupun informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang pada akhirnya mendapat *bubaward* pada kategori *Best Website Government Category* tiga besar.

2. Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan

Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan target pada tahun 2019 adalah 100%, dan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%, tercapainya indikator ini dikarenakan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rembang, dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Hal ini dilandaskan pada salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.

Tabel III.6

Sasaran 5 : Terciptanya pelayanan publik yang cepat tanggap dan prima

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capai - an 2019	% Capai - an 2018	% Capai - an 2017	RPJMD	
	2019	2019				Target Akhir 2021	% Capai - an s/d 2019
1	2	3	$4=3/2*100\%$	5	6	7	$8=3/7*100\%$
Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	95%	100%	105.26 %	92%	75%	100%	100%
Persentase surat / santel yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata capaian			100%	100%	100%	100%	100%

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

3. Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang bersama-sama dengan stakeholder lainnya terutama dengan BPS Kabupaten Rembang terus berupaya menyediakan data-dan informasi, baik data dasar maupun data sektoral strategis. Data dan informasi tersebut diharapkan menjadi dasar utama proses perencanaan dan pengambilan keputusan, baik kebijakan makro maupun spasial kewilayahan di masing-masing kecamatan.

Dari kerjasama dan kolaborasi tersebut telah dihasilkan beberapa dokumen data yang tersedia dan dipublikasikan :

No	Dokumen Data/Informasi	Kebutuhan (Dokumen)	Ketersediaan	Capaian
1	Daerah Dalam Angka (DDA)	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Kecamatan Dalam Angka (KDA)	14 dokumen	14 dokumen	100%
3	Dokumen Strategis Lainnya	2 dokumen	2 dokumen	100%
	• Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rembang 2019			
	• Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rembang 2019			

Dari total 17 data/dokumen perencanaan pembangunan, berhasil tersedia 17 data, dengan demikian capaian Presentase Ketersediaan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan untuk Tahun 2019 adalah 100%.

4. Persentase surat / santel yang dikelola

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam urusan pelayanan persandian bertugas mengelola dan mendistribusikan dokumen/berita/surat kawat yang melalui kanal santel yang dikelola oleh Bidang Aptika Dinkominfo Kabupaten Rembang sepanjang tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Jenis Berita	Jumlah	Dikelola/ distribusikan	Terhenti	Capaian
1	Berita Santel	1.510	1.510	-	100%
2	Berita Gora	63	63		100%

Dengan demikian capaian presentase surat/santel yang dikelola Dinkominfo Kabupaten Rembang untuk Tahun 2019 adalah 100%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

Urusan	Satuan	Kinerja							
		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Komunikasi dan Informatika									
Skor Pegi (Pemeringkatan e-Government)									
	Skor	2,62	2,43	2,81	2,22	3,01	22,24	3,2	2,87
Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan									
	%	90	-	100	100	100	100	100	100
Persentase PD telah memiliki website aktif									
	%	86,97	-	100	100	100	100	100	100
Urusan Statistik									
Persentase ketersediaan datadan informasi perencanaan pembangunan									
	%	70	70	75	70	80	95	85	100
Urusan Persandian									
Persentase surat / santel yang dikelola									
	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan pasti ditemukan adanya hambatan

atau kendala. Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain :

Hambatan dan kendala yang dihadapi

1. Perencanaan kegiatan yang disusun masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan) termasuk data yang belum akurat;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa kegiatan;
3. Kurang lengkapnya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
4. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang belum memadai;
5. Belum maksimalnya dukungan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
6. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang belum terbina dengan baik dan harmonis;
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik.

Suatu permasalahan timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah sehingga diperlukan adanya upaya guna mengatasi keterbatasan/kendala yang timbul.

Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain :

1. Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
2. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap;
3. Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Seminar, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab);
4. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
5. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan

harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

B. Perbandingan antara Renstra Lama dan Renstra Baru

No.	RENSTRA LAMA		RENSTRA BARU	
	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Pengerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 10. Penyediaan makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor / Kebersihan 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dewan Daerah	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 4. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan

		2. Pengadaan Perlengkapan Kantor 3. Pengadaan Peralatan Kantor 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah 2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Penyusunan Renja, Renstra 5. Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Anggaran	Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	1. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
4	Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	1. Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	1. Pengelolaan Persandian Daerah
5	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media	1. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi		

	Massa	2. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Serta Pelayanan Informasi Publik 3. Pengembangan dan Pengelolaan Website 4. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan FK Metra 5. Penyelenggaraan Layanan Aduan Masyarakat 6. Pembentukan / Pemberdayaan BAKO HUMAS / Forum Kehumasan		
6	Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	1. Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 2. Pengawasan dan Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi 3. Pengawasan dan Pembinaan Radio Siaran dan Radio Komunikasi	Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 2. Pembinaan Layanan Kehumasan
7	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	1. Pembinaan dan Pengembangan LPSE 2. Pemeliharaan Jaringan dan Menara Wave LAN 3. Pembangunan Data Center 4. Pengelolaan Data Center 5. Pengadaan Server 6. Pengadaan Infrastruktur Jaringan FO	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Penyusunan Data Statistik
8	Kerjasama Informasi dan Media Massa	1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Layanan Monitoring Isu Publik Media	Pengembangan e-Government	1. Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan e-Government 2. Pengelolaan dan Pengembangan Data Elektronik

9	Peningkatan Kapasitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika	1. Penyelenggaraan e-Government 2. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 3. Pengembangan SDM Komunikasi dan Kehumasan		
10	Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	1. Penusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2. Pemeliharaan dan Pengembangan Pengelolaan Data Elektronik		

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai;
3. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan terkoordinir dan terencana.

C. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan transparansi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan menurut urusan pemerintah, berupa pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Pada tahun anggaran 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang memiliki total anggaran sebesar Rp. 5.429.797,-. Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel.5
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019

NO	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	979,716.100,00	959,627,939	20,088,161
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	1,498,000	2,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	420,000,000	411,611,946	8,388,054
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	160,000,000	159,999,400	600
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,000,000	10,000,000	0
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	9,797,000	203,000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	4,997,425	2,575
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000,000	3,143,440	1,856,560
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000,000	6,982,000	18,000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000,000	3,900,000	100,000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	25,000,000	24,938,575	61,425
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	158,050,000	154,475,291	3,574,709
12	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	133,000,000	131,458,000	1,541,200
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	41.166.100	36,826,062	4,340,038

NO	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	149,550,000	143,525,375	6,024,625
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	19,850,000	19,805,000	45,000
15	Pengadaan Perlengkapan Kantor	19,100,000	19,030,000	70,000
16	Pengadaan Peralatan kantor	40,000,000	38,124,800	1,857,200
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10,000,000	9,999,500	500,000
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	30,600,000	29,507,075	1,092,295
19	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor	20.000,000	19,827,000	173,000
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan kantor	10,000,000	7,214,000	2,786,000
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	26,065,700	634,300
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	53,750,000	51,457,177	2,292,823
22	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	5,000,000	4,778,700	221,300
23	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8,000,000	6,709,877	1,290,123
24	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7,000,000	6,870,800	219,200
25	Penyusunan Renja, Renstra	17,750,000	17,661,900	88,100
26	Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	6,000,000	5,886,400	113,600

NO	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
27	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Anggaran	10,000,000	9,636,500	360,500
D	Program Pengolahan dan Pengembangan Persandian Daerah	25.000.000	18,426,300	6,537,700
28	Pengolahan Persandian Dan Keamanan Informatika	25.000.000	18,426,300	6,537,700
E	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.614,490,000	1,507,339,200	107,150,800
29	Pengolahan Alat Studio dan Komunikasi	9.490.000	9,489,600	400
30	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Pelayanan Informasi Publik	70,000,000	64,711,800	5,288,200
31	Pengembangan dan Pengelolaan Website	75,000,000	68,012,000	6,988,000
32	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan FK Metra	60,000,000	56,692,000	3,308,000
33	Penyelenggaraan Pelayanan Aduan Masyarakat	1.400 ,000,000	1,308,433,800	91,566,200
34	Pembuatan / pemberdayan BAKO Humas /Forum Kehumasan	0	0	0
F	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	107,000.000	100,497,136	6,502,864
35	Penyelenggaraan e-Gov	72,000.000	67,059,136	4,940,864
36	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informatika	15.000.0000	14,270,000	730,000
37	Pengembangan SDM Komunikasi dan Kehumasan	20.000.000	19,168,000	832,000
G	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	54.000.000	51,624,000	2,376,00
38	Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	20.000.000	19,176,000	824,000
39	Pelayanan Monitoring Isu Publik Media	34.000.000	32,448,000	1,552,000

NO	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
H	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	92,338,500	89,877,150	2,461,350
40	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	65,000,000	63,893,150	1,106,850
41	Pengawasan dan Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	12,338,500	11,729,000	609,500
42	Pengawasan dan Pembinaan Radio Siaran dan Radio Komunikasi	15,000,000	14,255,000	745,000
I	Program Pengembangan Data/Informasi / Statistik Daerah	125,000,000	98,177,400	26,882,600
43	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	85,000,000	63,210,800	21,789,200
44	Pemeliharaan dan Pengembangan Pengolahan Data Elektronik	40.000.000	34,906,600	5,093,400
J	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	2.228,952,400	2,097,684,619	131,267,781
40	Pembinaan dan Pengembangan LPSE	60.352.400	60,088,000	264,400
41	Pemeliharaan Menara dan Jaringan Wave LAN	140,000,000	136,230,800	3,769,200
42	Penyusunan Dokumen Perencanaan Data Center	100,000,000	98,810,150	1,189,850
43	Pengolahan Data Center	20.000.000	7,900,000	12,100,000
44	Pengadaan Server	450.000.000	424,067,600	25,932,400
45	Pengadaan Infrastruktur Jaringan FO	1.458.600.000	1,370,588,069	88,011,931
	JUMLAH	5.429.797,000		

Realisasi Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel.6

No	Program	Realisasi			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14%	20 %	29%	34 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1%	12%	37%	45%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6%	19%	30%	41%
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	5%	14%	22%	35%
5	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	0%	9 %	19 %	67 %
6	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	12 %	0 %	42 %	43 %
7	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	4%	19%	31%	41 %
8	Program Pengembangan Data/Informasi / Statistik Daerah	0%	5 %	19 %	59%
9	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	3 %	10 %	23 %	49 %
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	3 %	21 %	23 %	27 %

Kendala serta hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah untuk penyebarluasan informasi pembangunan kepada

masyarakat luas. pada tahun 2019 perangkat daerah yang memiliki website baru, dan informasi yang disajikan belum *up to date*.

- 2) Belum optimalnya sistem informasi terpadu yang mengarah pada *e-Government* dan penerapan *blueprint e-Government* belum optimal. Jumlah aplikasi e-goverment di lingkup pemerintah daerah kabupaten aplikasi belum optimal.
- 3) Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi.
- 4) Belum adanya unit pengaduan *online* terpadu.
- 5) Belum tersedianya data base dan data informasi yang valid dan *uptodate*
- 6) Belum optimalnya pengelolaan persandian
- 7) Belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan.

BAB IV

PENUTUP

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2019. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP merupakan dokumen yang menggambarkan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2016 s/d 2021.

Hasil Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang pada tahun 2019 Dinas Kominfo Kabupaten Rembang telah melaksanakan 48 kegiatan dengan 10 program yang dilaksanakan berdasarkan pemikiran sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan yang dicapai rata – rata 96,64 % dari 10 program sasaran dengan data capaian sebagai berikut :

Tabel.7

NO	Program	Nilai Capaian Kinerja	Keterangan Skor
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,95%	Sangat tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,97%	Sangat tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	95,73%	Sangat tinggi
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	93,36%	Sangat tinggi
5	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	93,92%	Sangat tinggi
6	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	95,60 %	Sangat tinggi
7	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	98,07 %	Sangat tinggi

NO	Program	Nilai Capaian Kinerja	Keterangan Skor
8	Program Pengembangan Data/Informasi / Statistik Daerah	78,49 %	Tinggi
9	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	94,11 %	Sangat tinggi
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	89,18 %	Tinggi
Jumlah data		94,26%	Sangat tinggi

Keterangan

00,00 – 50,00	: Sangat rendah
50,00 – 65,00	: Rendah
65,00 – 75,00	: Sedang
75,00 – 90,00	: Tinggi
90,00 – 100,00	: Sangat tinggi

Dengan adanya laporan kinerja terhadap kegiatan, program, maupun kebijakan yang telah dilaksanakan diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan/sasaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu diharapkan pula adanya langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan kinerja yang telah dilaksanakan dimasa yang akan datang agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip *Good Governance*.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2019 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan untuk tahun berikutnya.

Rembang, Pebruari 2019

A.n.KEPALA DINASKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIS

Jabatan	Tgl	Paraf
Sekdin		
Kabid E-Gov		
Kabid IKP		

Drs. ANDI DIMYANTO

Pembina Tk. I

NIP. 19621215 199003 1 012